

A. Pendahuluan

Dipenghujung abad lalu, tepatnya Bulan Desember 1999, salah satu ruas jalur jalan Lintas Sumatera mengalami macet total selama 5 hari. Jalur yang mengalami macet itu adalah pada dua kampung yaitu Sungai Dareh dan Pulau Punjung. Asal muasalnya adalah kedua kampung -yang dibatasi oleh Sungai Batang Hari dan dihubungkan dengan sebuah jembatan¹ - sedang berlangsung **bacakak banyak**,² sehingga mobil-mobil yang melewati jalur h itu dicegah oleh kedua belah pihak untuk melanjutkan perjalanan.³ Dalam perang antarkampung itu, kedua pihak yang telah berseteru lama itu meminta bantuan pada kampung tetangganya, sehingga melibatkan banyak orang didalamnya. Surat kabar **Padang Ekspres** melaporkan bahwa perang antara Pulau Punjung dengan Sungai Dareh itu melibatkan tiga puluh ribu orang. Mereka menggunakan bermacam senjata seperti seperti pedang, parang, anak panah berapi dan gobok (sejenis senjata api, yang biasanya digunakan untuk berburu babi oleh masyarakat).⁴ Ketika korban mulai jatuh, pada saat rumah penduduk yang tak bersalah mulai dibakari oleh pihak yang bertikai dan bahkan pada puncaknya ketika 5 nyawa melayang dari kedua belah pihak yang sedang berperang, maka Kapolda Sumbar Brijen Polisi Dasrul Lamsudin menurunkan anak buahnya dari kesatuan Brimob Padang, Padang Panjang, dan Payakumbuh sebanyak 5.000 orang anggotanya turun kelapangan, untuk mencegah korban nyawa dan harta benda pendudukan yang semakin

¹ Jembatan Sungai Dareh ini diresmikan pemakaiannya oleh Presiden Soeharto pada tahun 1977, yang pada saat itu merupakan Jembatan terpanjang di pulau Sumatera. Lihat misalnya, Mestika Zed, dkk, 1998. *Sumatera Barat di panggung Sejarah 1945-1995*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

² Dalam bahasa Minangkabau, istilah **bacakak banyak** ini diambil dari ungkapan yang lazim digunakan ketika terjadi perkelahian massal antar kampung di Minangkabau. Bacakak sama artinya dengan perkelahian massal atau tawaran. Hanya saja, perkelahian itu melibatkan orang satu kampung dan kadangkala kampung-kampung bersebelahan juga ikut membantu. Untuk selanjutnya, bacakak banyak akan disebut perang antarkampung.

³ "Macet Total di Pulau Punjung dan Sungai Daerah", dalam Surat kabar **Harian Padang Ekspers**, 20 Desember 1999, hal. 1.

⁴ "Senjata Api Menyalak : Korban Jiwa Tak Terelakkan dari Bacakak Banyak di Sungai Dareh", dalam Surat kabar harian **Singgalang**, 24 Desember 1999, hal. 1.

banyak.⁵ Barulah, setelah kesatuan Brimob itu turun tangan, maka selama 2 pula penyelesaian dapat dijalankan.

Mengikuti seksama penyebab perang antarkampung itu, pada awalnya hanya masalah kecil saja. Ketika ada keramaian organ Tunggal di Pulau Punjung, seorang anak muda dari Sungai Dareh tersinggung oleh ucapan pemuda Pulau Punjung. Pemuda Pulau Punjung menyatakan bahwa jika ada yang berjoget diatas panggung, maka akan dibunuh. Ucapan itu dijadikan alasan bagi pemuda Sungai Dareh untuk melawan pemuda Pulau Punjung. Pada gilirannya, ketika dalam acara organ tunggal itu, seorang pemuda Sungai Dareh tersenggol oleh pemuda Pulau Punjung, maka perkelahianpun tidak dapat dielakkan. Pada awalnya perkelahian itu hanya melibatkan mereka yang hadir pada acara itu. Namun, esok harinya mereka membawa orang kampung dan kampung tetangganya untuk menghadapi lawanya. Puncaknya adalah menjadi perang antarkampung yang tidak hanya berakibat terhadap mereka yang bertikai saja, etapi juga melumpuhkan jalur penting pada lintas Sumatera.⁶

Dari kasus diatas terlihat bahwa fenomena perang antarkampung merupakan gejala yang sering terjadi di kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Gejala ini sesungguhnya semakin kuat ketika diberlakukannya UU no. 5 tahun 1979 mengenai pemerintahan desa. Ketika pemerintah desa terbentuk, maka batasan-batasan geografis yang dianggap sebagai kesatuan nagari menjadi pudar, sehingga alasan-alasan kecil saja mudah menjadi perang antarkampung. Persoalannya tidak hanya pada masalah tanah ulayat saja, akan tetapi juga menjalar pada masalah sosial, ekonomi, elite dan kesatuan politik lokal.

Menurut hasil survey majalah **Tempo**, "Setelah Wali Nagari Hapus",⁷ menyebutkan bahwa bersamaan dengan lahirnya UU No. 5/1979. Kepemimpinan kharismatik itu telah digeser oleh kepala desa. Dengan adanya Undang-Undang tersebut partisipasi rakyat semakin berkurang dan

⁵ Ibid.

⁶ Wawancara dengan M. Zen, seorang pedagang dari Sungai Dareh.

⁷ "Setelah Wali Nagari Hapus", majalah **Tempo**, No. 14 th XIX-3 Juni 1989, hal 18.

mereka terkurung dalam sistem birokrasi yang diciptakan secara nasional, tanpa memperhatikan aspirasi lokal. Kepala desa tidak begitu dekat dengan masyarakat dan kurang dikenal apalagi yang duduk di LKMD, bukan lagi elite nagari dulu.

Salah satu kelompok yang penting dalam penyelesaian perang antarkampung ini adalah elite lokal seperti penghulu. Dalam kasus Padang Sibusuk misalnya, elite ini berhasil mendamaikannya. Para ninik mamak dahulunya mengalami perpecahan akibat terbentuknya pemerintahan desa, namun menyatu kembali setelah terjadinya perang antarkampung. Surat kabar Singgalang memberitakan, kelompok yang bertikai itu bersatu kembali. Secara haru, Mereka yang sebelumnya berperang kemudian saling bermaaf-maafan,⁸ dengan harapan terciptanya persatuan dan kesatuan yang kokoh, para penghulu adat dikampung dapat bersatu kembali. Pada gilirannya, tuntutan terhadap penghulu adat tidak hanya sekedar pimpinan dalam satu suku saja, tetapi juga merupakan penentu dalam memajukan pembangunan nagari pada masa depan.

Mengikuti secara sekseama masalah perang anatar kampung ini, persoalannya menjadi krusial, karena perang antarkampung di kabupaten Sawahlunto Sijunjung itu tidak hanya satu atau dua kejadian, akan tetapi secara merata melibatkan kampung-kampung diberbagai pelosok di kabupaten itu. Artinya, ketika Orde Baru berkuasa, maka masyarakat memiliki rasa takut yang dalam terhadap polisi dan tentara, sehingga pertikaian dengan mudah diatasi. Namun ketika rezim itu berakhir, ketika kekuatan tentara tidak lagi dominan dan polisi bukan lagi yang ditakuti masyarakat, maka berbagai persoalan seringkali diselesaikan dengan cara kekerasan.

Ketidakpuasan yang melanda masyarakat selama ini dengan mudah saja bisa dibakar dan menjadi perang antarkampung. Menurut Dom Helder Camara, kekerasan merupakan realitas yang berbentuk multidimensional. Kekerasan tidak bisa dipisahkan keterkaitannya antara kekerasan yang satu dengan kekerasan lainnya, sehingga ia terus mengalir seperti air saja. Dari kekerasan yang paling

⁸ "Ninik Mamak Kampung Baru Bersatu Kembali Haru, Mereka pun Saling Bermaafan", Surat kabar Singgalang, 23 November 2000.

mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan yang melanda sebagian masyarakat, sehingga membuat mereka memberontak.⁹ Dalam bentuk lain, Gurr menyatakan bahwa kekerasan dalam masyarakat merupakan puncak dari kekecewaan dan ketidaksenangan yang telah bertumpuk-tumpuk secara mendalam dan terpendam selama ini.¹⁰

Dibandingkan dengan kasus Ambon, Poso ataupun Kalimantan, maka pola perang yang terjadi di kabupaten Sawahlunto lebih bersifat antarkampung dan tidak meluas dalam batasan kecamatan ataupun kabupaten. Solidaritas yang dikembangkan dalam perang itu terbatas solidaritas satu kampung saja, sehingga sulit meluasnya. Berbeda dengan kasus Ambon, Poso ataupun Kalimantan, dimana solidaritas yang dikembangkan adalah solidaritas agama atau antar etnis. Dengan memiliki kesamaan agama ataupun etnis yang sama yaitu agama Islam dan etnis Minangkabau, maka solidaritas yang dikembangkan hanya bersifat nagari, sehingga perang ini tidak meluas dan menelan korban lebih banyak lagi.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk penentuan lokasi penelitian, maka diambil berdasarkan konsentrasi dari wilayah yang memiliki tingkat konflik yang tinggi. Penentuan wilayah ini juga berkaitan dengan keterlibatan kualitas konflik yang terjadi. Dari beberapa kasus yang memiliki intensitas yang tinggi selama ini, maka daerah riset akan meliputi perang antarkampung seperti Sungai Dareh, Pulau Punjung, dan Sikabau. Ketiga daerah ini dianggap sebagai daerah yang memiliki potensi konflik yang tinggi. Untuk jelasnya, maka dirumuskan permasalahan yaitu ;

1. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya perang antarkampung di kabupaten Sawahlunto Sijunjung ?
2. Bagaimana peristiwa itu berlangsung dan siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa itu ?
3. Bagaimana pola penyelesaian dalam setiap terjadinya perang antarkampung ?
4. Bagaimana peranan elite dalam penyelesaian konflik ?.

⁹ Dom Helder Camara. *Spiral Kekerasan*, terj. Komunitas Apiru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal x-xi.

¹⁰ Robert Gurr, 1969. *Why Men Rebel*. Princeton : Princeton University.

C. Tujuan Penelitian

Dalam melihat gejala tingkat perang antarkampung yang tinggi, maka melalui penelitian ini diharapkan terdapat beberapa pemikiran yang dapat menyelesaikan pokok pangkal persoalan itu. Untuk itu, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya perang antarkampung di kabupaten Sawahlunto Sijunjung
2. Mengkaji cara-cara yang digunakan dalam setiap penyelesaian konflik, sehingga didapatkan cara yang efektif dalam penyelesaian konflik
3. Menganalisis keberadaan elite-elite informal dalam mendorong atau mencegah terjadinya perang antarkampung.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensiaonal.¹¹ Dimensi yang dilihat tidak saja dari sejarah, akan tetapi juga faktor sosial, ekonomi, politik, dan hukum, sehingga menimbulkan konflik antar kampung dalam masyarakat di Sawahlunto Sijunjung. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan menggunakan konsep-konsep dan teori dari sosiologi, politik, antropologi, dan hukum. Meskipun pada pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian sejarah, akan tetapi dengan menggunakan konsep dan pendekatan dari berbagai bidang ilmu sosial, maka akan sangat berguna untuk mempertajam analisa sejarah.

Pendekatan interdisipliner untuk menjelaskan berbagai persoalan tentang perangkampung. Pendekatan sosiologi misalnya, diharapkan dapat membantu untuk mempertajam analisa tentang komunitas sosial, interaksi-sosial, konflik sosial dan perubahan sosial. Melalui pendekatan ekonomi diharapkan akan mampu memberikan gambaran tentang masalah ekonomi masyarakat, Konsep-konsep Politik diperlukan untuk menjelaskan hubungan antar elite dan konflik yang terjadi. sedangkan bidang ilmu hukum diharapkan dapat memberikan gambaran masalah pola pemilikan tanah sebagai salah satu sumber utama konflik.

¹¹ Sartono Kartodirdjo, 1992. Pendekatan Ilmu-ilmu sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta : PT Gramedia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,¹² yang berdasarkan cara kerja metode sejarah.¹³ Sebagai sebuah penulisan sejarah, maka diperlukan beberapa langkah atau metode untuk merekonstruksi masa lalu ataupun obyek yang akan diteliti. Untuk itu ada beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu:

Heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber penulisan. Sumber diperoleh melalui studi lapangan dan studi arsip/dokumen. Studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan berbagai orang yang terlibat ataupun mengetahui masalah perang antarkampung. Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumenter, yaitu mengumpulkan data arsip, dokumen dan laporan-laporan pihak kepolisian, koran maupun catatan-catatan lainnya. Dalam studi sejarah, sumber ini merupakan sumber primer dan menjadi sumber utama dalam merekonstruksi pokok persoalan yang dibahas yaitu perang antarkampung.¹⁴

Kritik sumber dilakukan dengan jalan kritik ekstern dan intern pada data tertulis maupun data lisan.

Interpretasi, yaitu untuk menemukan jalinan-jalainan antar data yang telah diperoleh baik data lisan maupun tulisan, sehingga didapatkan suatu gambaran yang lebih jelas dari data yang ada.

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi atau penulisan sejarah yang merupakan rekonstruksi dari objek penulisan ini, dengan melihat berbagai titik hubung dan causalitas dari berbagai peristiwa yang telah terjadi.

F. Hasil penelitian

Dalam melihat kasus bacakak banyak di kabupaten Sawahlunto Sijunjung, terdapat beberapa persoalan pokok yang harus dilihat. Fenomena bacakak banyak dalam lingkungan remaja bisa jadi berawal hal yang sepele, seperti tersenggol di pasar, kaki dikeramaian, dan menggoda perempuan di jalan, berkelahian antar kampung bisa dengan mudah terjadi.

¹² Koentjaraningrat, 1981. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Gramedia

¹³ Gilbert J. Graraghan. 1972. *A Guide Historical Method*. New York : Fordham University press.

¹⁴ Taufik Abdullah, 1987. Sejarah Lisan Untuk Masyarakat Sejarawan Setempat, dalam jurnal *Sejarah Berita Lisan*. Jakarta : LIPI.

Pada tahap ini, nilai-nilai kemanusiaan semakin kabur. Tanpa bermaksud mencari kambing hitam dari persoalan yang ada, hal ini telah menjadi lingkaran setan ataupun benang kusut masai, sehingga dibutuhkan pembenahan yang lebih sistematis, dan koordinatif. Pendekatan yang digunakan tidaklah bersifat top down, yang memiliki corak pembenaran dari atas. Akan tetapi, pembenahan dilakukan dengan perspektif kelompok yang bertikai, sehingga mereka dapat melihat persoalan mereka sendiri dan akibat yang ditimbulkannya.

1. Dalam melihat tindakan kekerasan dan perilaku agrevitas, sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri. Ia memiliki banyak dimensi yang harus diuraikan, sehingga dapat melihat persoalan ini dalam perspektif yang beragam. Artinya, dari setiap persoalan dan kelompok yang bertikai, diurai terlebih dahulu unsur-unsur yang menyebabkan konflik itu muncul.

Jika dipahami dengan seksama, sesungguhnya setiap persoalan diatas tidak berdiri sendiri, akan tetapi memiliki kaitan satu dengan lainnya. Misalnya, ketika di Sikabau muncul agretivitas di kalangan remaja, mereka menyatakan bahwa itu bentuk perlawanan mereka terhadap elite lokal yang menyerobot mata pencaharian mereka, berupa lahan parkir. Begitu juga, ekonomi misalnya, bukan alasan tidak mampu mereka tidak bersekolah, akan tetapi lebih banyak disebabkan mudahnya mendapatkan uang di wilayah kecamatan Pulau Punjung itu, sehingga membuat mereka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Untuk lebih sistematisnya saja, uraian berikut mencoba membahas satu persatu dari enam point diatas, dengan mencoba memberi penjelasan causalitas atau sebab akibat antara satu persoalan dengan persoalan yang lainnya.

1. Gengsi, Pagar Nagari dan Posisi keterlibatan Elite lokal

Seorang pengetua adat di Sikabau menyebutkan bahwa ; "Jika kampung sudah dimasuki oleh orang lain, dan kemudian dia macam-macam tingkahnya dikampung kita, dimana letak harga diri. Adalah kewajiban setiap orang untuk membela kampungnya dari penghinaan orang lain". Hal yang penting bagi mereka adalah "Tibo di Nagari Nagari ditagakkan, Tibo di kaum, kaum ditagakkan". Dalam konteks ini,

pembelaan terhadap kampung menjadi suatu hal yang wajib dilakukan. Tidaklah heran, dalam banyak kasus, tetua kampung secara tidak langsung juga ikut terlibat dalam perilaku tindakan kekerasan dan agresivitas di kalangan remaja.

Misalnya saja, peristiwa abad lalu anantara sungai Dareh dengan Pulau Punjung, menurut beberapa informan, ada sebuah skenario besar yang disiapkan untuk agenda itu. Kongkriknya begini, menjelang puasa tahun 1999, masyarakat Pulau Punjung berniat untuk mengadakan acara dalam menyambut bulan suci itu. Adapun bentuk acara yang diadakan adalah orgen tunggal, yang sesungguhnya juga tidak bernuansa Islam, karena acara seperti ini akrab dengan minuman keras, judi dan obat-obatan. Dalam penyusunan agenda acara, tetua masyarakat Pulau Punjung sudah merencanakan bahwa jika ada orang Sungai Dareh yang mengacau, maka mereka siap untuk membalas.

Sebagai wilayah yang bersebelahan dan dibatasi oleh sungai perseteruan kedua wilayah ini merupakan perseteruan yang sudah lama. Warisan itu sampai saat ini masih berlaku, sehingga kalau ada orang mengadakan acara seperti orgen tunggal, olah raga, ataupun keramaian lainnya, maka seringkali terjadi kekacauan oleh kalangan mudanya. Begitu juga ketika sambu puasa tahun 1999 itu.

Hanya saja, tidak untuk setiap persoalan harus dibela kaum mudanya. Bahkan, seorang tetua lain menyatakan bahwa : "Kami telah bosan mengurus mereka. Persoalannya hanya itu melulu yaitu Bacakak banyak antar kampung". Perilaku ini pada gilirannya sudah menjadi hal keseharian, sehingga menghabiskan energi didalamnya.

Ada dua versi yang saling bertolak belakang tentang hubungan orangtua kampung dengan kaum remaja. Pada satu sisi, orang-orangtua menyalahkan remaja yang hobby berkelahi. Pada sisi lain, anak muda menyalahkan orang tua yang mengambil lahan bisnis mereka.

2. Sekolah : Untuk Apa, Toh Banyak Juga Sarjana Yang tak Kerja ...

Kalau sekolah mencari uang, tanpa sekolahpun juga dapat uang. Lantas sekolah untuk apa sekolah ? Setidaknya begitu ungkapan

keseharian yang ditemukan di kalangan anak-anak di peesaan kecamatan Pulau Punjung, terutama mererka yang tidak berminat untuk sekolah. Dunia pendidikan sendiri memang baru berkembang di wilayah itu. Tingkat pendidian yang tertinggi adalah SMA, itupun baru dalam sepuluh tahun belakangan ini. Masalah minat belajar anak merupakan suatu persoalan sendiri. Rendahnya minat belajar membuat mereka enggan untuk sekolah. Apalagi, kondisi alam yang yang berkecukupan sangat berpengaruh pada keinginan mereka untuk sekolah. Sartimya, apalah artinya sekolah, jika tanpa sekokaupun mereka dapat menikmati hidup yang serba berkecukupan. Hal ini berpengaruh siknifikan terhadap perilaku dan mentalitas sebahagian besar masyarakat, terutama bagi masyarakat asli. Bagi mereka ekonomi adalah nomor satu, sehingga yang lainnya nomor dua, tiga dan seterusnya. Akibatnya adalah pendidikan bagi mereka tidak terlalu penting, yang penting adalah bagi anak mudanya uang. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya mencari pekerjaan payah, dan harus kembali bekerja untuk “menakik getah” atau “masuk hutan”. Lebih baik dari sekarang bekerja, uang tidak habis dan malah bisa mengumpulkan uang.

Dapat dikatakan bahwa faktor pendidikan adalah faktor yang menentuka pola dan tingkah laku anggota masyarakat. Menurut Asmiar salah seorang guru di Pulau Punjung bahwa faktor pendidikan adalah faktor penting yang menyebabkan munculnya tindakan agresifitas remaja dan masyarakat secara umum. Menurutnya dengan bersekolah akan memberikan tentang pengetahuan yang luas dalam memahami hidup. Rendahnya motivasi anak untuk bersekolah disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, mentalitas yang sudah terbangun dan apatis melihat kondisi ekonomi. Pengaruh lingkungan disini adalah orang lebih mementingkan materi dibandingkan sekolah tinggi-tinggi. Anak-anak sejak kecil sudah mulai diajak ke hutan atau ke kebun untuk manakiak gatah, sehingga wajar saja anak yang bersekolah disini banyak yang punya kenadaraan bermotor.

3. Sholat Magrib di Sikabau

Berkumandang azan magrib sesungguhnya menyeruak sampai ke pelosok nagari. Dibantu oleh penguat suara, maka suara azan akan sampai dalam radius 3 km. Artinya, satu mesjid itu cukup mengingatkan orang kampung untuk solat ke mesjid. Ketika menginjakkan kaki di mesjid, (sebuah mesjid yang megah dan besar, barangkali dapat menampung 100 jamaah), yang ditemui adalah orang-orang tua yang sedang sembahyang. 14 Laki-laki, dan 7 perempuan, merupakan jamaah yang mengisi solat magrib di mesjid Sikabau. Lantas, yang lainnya bagaimana?. Satu hal yang pasti, anak-anak muda masih asik di warung-warung. Ibu-ibu asyik mengasuh anaknya. Sementara itu, sebuah surau kecil yang jaraknya 50 meter dari mesjid itu sedang solat berjamaah sekitar 50 orang. Dengan gambaran seperti itulah, Islam menjadi agama utama yang dianut dalam masyarakat. Satu pertanyaan ingin diajukan, masihkah agama menjadi tawaran yang menarik bagi masyarakat?.

Pertanyaan di atas agaknya tepat diajukan pada masyarakat, karena persoalan keberagaman menjadi krusial. Artinya, walaupun masyarakat merata memeluk agama Islam di wilayah penelitian, namun mereka belumlah menjalankan agama Islam secara lebih konsisten. Berbagai fasilitas agama cukup memadai tersedia. Namun, mesjid misalnya lebih banyak diisi oleh orang-orang tua. Dengan sendirinya, persoalan agama menjadi persoalan yang cukup krusial sebagai tuntutan hidup dalam masyarakat. Bahkan, agama yang seharusnya dapat dijadikan filter bagi kemaksiatan, namun ulama dan masyarakat telah gagal menjadikannya sebagai sebuah ideologi, sehingga berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat gagal diperbaiki.

4. Anugerah Tuhan yang melimpah

Dalam melihat kondisi ekononim Pulauunjung, ada dua kisah yang menarik untuk diceritakan. Kisah pertama, "Berapa harga ikan paten Sekilo", begitu terdengar seorang ibu menanyakan harga ikan kepada seorang pedagang. Dijawab oleh pedagang itu harganya Rp. 30.000.- Sang ibu yang pegawai negeri (terlihat dari pakaian seragamnya) menawar Rp.

25.000.- Sebelum pedagang menjawab, seorang ibu lain (perempuan kampung biasa, terlihat dari pakaiannya) menanyakan berapa kilo ikan yang ada. Sang pedagang menjawab 5 kilo. Lantas, ibu itu tanpa menawar-nawar langsung memborong semua ikan yang ada. Kebetulan ibu itu baru panen sarang burung walet.

Kisah kedua, seorang toke emas bercerita bahwa seorang ibu, yang kebetulan penduduk kampung menayakan harga sebuah kalung yang berat 20 emas. Ketika dijawab harganya emas Rp. 5 juta. Tanpa menawar-nawar, ia langsung membayar dan kemudian ia memberi bonus lagi sebanyak Rp. 100,000,-

Dua kisah diatas memperlihatkan bahwa Pulau punjung sebagai wilayah penelitian memperlihatkan tingkat ekonomi yang bagus. Potensi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pulau Punjung dapat dikatakan sangat baik. Potensi utama terletak pada dukungan sumber daya alam terutama karet, kebun kelapa sawit dan sanrang walet. Khusus untuk yang terakhir ini, mereka mampu memanen sekali empat bulan, yang membuat ekonomi masyarakat demikian hidupnya. Seorang tokoh terkemuka di Pulau Punjung mengakui bahwabahwa potensi sumber daya alam yang memadai tersebut menyebabkan daerah ini disebut sebagai "daerah dollar". Uang banyak beredar sehingga kehidupan sosial-ekonomi masyarakat relatif baik. Hal ini secara kasat mata dapat dibuktikan dengan perilaku dan pola kehidupan masyarakat. Dimana pola kehidupan konsumtif adalah ciri khas masyarakat Pulau Punjung dan Sungai Dareh. Hal ini terlihat dari jelas ketika hari pasar di Pulau Punjung. Pada saat hari pasar pada setiap hari jumat dan minggu, Pasar Pulau Punjung sangat ramai di kunjungi oleh para pedagang dan pembeli.

Dukungan sumber daya alam itu yang kemudian menjadi daya tawar bagi masyarakat di luar Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Mereka berdatangan dan tinggal untuk menjadi pelaku ekonomi. Biasanya pendatang tersebut sebahagian besar bekerja sebagai pedagang. Pada umumnya pendatang berasal dari Batusangkar, Bukittinggi, Padang

Pariaman, Solok, Padang Panjang dan Payakumbuh. Ada juga yang sebahagian yang berasal dari luar Sumatera Barat seperti Jambi dan Jawa.

Baiknya tingkat ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari sektor perilaku sosial. Dimana pada umumnya masyarakat mulai dari orang tua sampai kepada anak-anaknya memperagakan dalam bentuk barang berharga seperti emas. Di leher, pergelangan tangan dan jari mereka senantiasa dihiasi dengan emas dan berlian. Ini tidak hanya dipakai oleh kaum perempuan akan tetapi juga dilakukan oleh kaum laki-laki. Disamping perhiasan juga dapat dilihat dari pakaian mereka. Pakaian anak gadis dan anak bujang di sini tidak kalah dengan pola berpakaian anak-anak remaja yang tinggal di kota.

Kemapanan sektor ekonomi masyarakat berpengaruh juga terhadap pola dan perilaku kawula remajanya secara lebih khusus, terutama yang berasal dari penduduk asli. Sebahagian besar mereka lebih memilih untuk bekerja untuk mencari uang dibandingkan untuk bersekolah tinggi. Umumnya pendidikan mereka rata-rata tapat SD dan SMP. Setelah mereka tamat SD atau SMP lebih memilih untuk bekerja untuk "manakiak gatah, bakabun sawit atau karet, mamanan walet ataupun maambiak kayu ka hutan, sehingga dengan demikian anak mudo bapitih.

Dukungan sumber daya alam itu yang kemudian menjadi daya tawar bagi masyarakat di luar Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Mereka berdatangan dan tinggal untuk menjadi pelaku ekonomi. Biasanya pendatang tersebut sebahagian besar bekerja sebagai pedagang. Pada umumnya pendatang berasal dari Batusangkar, Bukittinggi, Padang Pariaman, Solok, Padang Panjang dan Payakumbuh. Ada juga yang sebahagian yang berasal dari luar Sumatera Barat seperti Jambi dan Jawa.

Jika dibandingkan antara jumlah penduduk asli dan pendatang hamber beimbang. Kira-kira 50% penduduk asli dan 50% pendatang. Hubungan antara pendatang dan asli berjalan dengan baik. Sangat jarang terjadi perselisihan antara pendatang dan asli. Hal ini di sebabkan oleh faktor keterbukaan antara kedua kelompok tersebut. Kalaupun ada perselisihan antara pendatang dan asli, cenderung penduduk pendatang

mengambil posisi mengalah. Maka dalam hal perkelahian dan konflik, itu hanya sering terjadi antar sesama penduduk asli.

5. Bijak kah penguasa !!! .

Dalam konflik antar masyarakat Pulau Punjung dengan Sungai Dareh, atau antara Sungai Dareh dengan Sikabau dan seterusnya sulit untuk dicegah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pihak elite dan pemerintah yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Elite dalam ini tokoh masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda ataupun tokoh lainnya seperti kepala desa/wali nagari. Hal disebabkan oleh ketidakmampuan elite dalam memberikan ketauladanan dan pembinaan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Bagaimana mungkin misalnya seorang kemenakannya patuh terhadap mamak/panghulunya kalau mamak atau datuk itu tidak mampu memberikan kebutuhan dan menyalurkan kehendak anak kemenakannya. Hal ini yang kemudian mengakibatkan mamak atau pemimpin yang lainnya tidak dihargai oleh anak atau kemenakannya.

Terjadinya peristiwa "bacakak banyak" atau tindakan kriminal lainnya susah untuk diberantas disebabkan oleh faktor lemahnya kontrol terhadap generasi muda, Bahkan yang terjadi adalah tokoh masyarakat dan adat ada yang terlibat dalam membesarkan peristiwa. Hal ini terjadi ketika persolan itu susah membawa nama dan harga diri nagari kampung. Kampung yang satu merasa dihina dan kampung yang lain merasa terhina sehingga kemampuan untuk berpikir jernih dan arif terpinggirkan oleh emosional kampung. Hal ini sudah berlangsung sudah sejak lama.

Penyebab utama yang menyebabkan "kejadian sepele" menjadi peristiwa besar atau "bacagak banyak" adalah ketidakecakapan pemimpin dan pemuka masyarakat dalam menghadang solidaritas ditingkat anak muda. Peristiwa itu sering terjadi secara spontanitas dan tidak reaksioner. Kejadian itu sangat susah untuk diredam ketika solidaritas massa sudah terbentuk. Misalnya pada suatu acara di Pulau Punjung. Dengan acara orang banyak berdatang mulai dari Sungai Dareh, Sikabau, Tabing Tinggi dan seterusnya. Karena disini pada umumnya anak muda peminum minuman keras dan mabuk-mabukan, tanpa sengaja terinjak kaki salah

seorang pemuda Pulau Punjung, maka hal-hal seperti inilah yang memicu terciptanya perkelahian massal. Jadi gimana caranya ninik mamak atau pemuka masyarakat berbuat banyak sedangkan peristiwa itu terjadi dengan cepatnya.

Hal ini itu memang diakui oleh aparat kepolisian. Bagi pihak kepolisian untuk menangani kasus perkelahian massal, minum-minuman, ngebut dijalan tanpa helm, menghisap ganja dan pegi ke "bombay", sepuah lokasi tempat bermain dengan "pekerja sek". Untuk pergi ke bombay ini minimal harus menyiapkan uang 300.000,- rupiah, karena untuk membeli minuman saja itu membutuhkan uang 100.000,- rupiah. Belum lagi kalau "main" dengan perempuan".

Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kalau anak kemenakan ditangkap arau tertanggap basah dan di bawa ke kantor polisi maka bisa saja masyarakat secara bergerombolan datang kesidi. Bisa-bisa kantor ini dilempar dan dibakar. Sedangkan kita hanya punya anggota terbatas. Kondisi itulah yang menyebabkan susah bagi kita untuk menegakkan hukum di daerah ini.

Akan tetapi sedikit berbeda dengan apa yang dikatakatakan oleh Wali Nari Sungai Dareh mengatakan bahwa terjadinya krisis kepemimpinan di tingkat masyarakat di sebabkan oleh kaburnya nilai dan pemahaman adat di tingkat pemegang adat dan masyarakat akibat diberlakukannya sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya sistem pemerintahan nagari peristiwa "konflik massal" semakin jarang terjadi. Peran-peran tokoh adat dan ulama yang selama ini terpinggirkan mulai mendapatkan perannya.

Kelompok pemicu terjadinya perkelahian massal itu adalah remaja. Menurut mereka perkelahian itu muncul karena jiwa muda yang masih menguasai dirinya. Aspek mempertimbangkan sebuah tindakan relatif pendek. Segala sesuatunya dipertimbangkan oleh rasa dan emisional. Penghinaan akan harga diri adalah alasan yang utama. Bentuk dari penghinaan itu bisa disebabkan oleh pacarnya yang diganggu kawan, fisiknya yang terganggu seperti disentuhnya salah satu bagian fisik.

Faktor kenalan remaja ini menurut mereka bukan disebabkan oleh diri mereka sendiri. Menurut Robbi salah anak muda mengatakan bahwa kenakalannya juga disebabkan oleh orang tua dan lingkungan kami tinggal. Kami merasa kurang diperhatikan dan dikontrol oleh orang tua, sehingga kami akhirnya dapat melakukan apa yang kami inginkan. Begitu juga dengan kontrol di tingkat masyarakat. Para tokoh masyarakat dan agama kadang-kadang tidak dapat memberikan contoh yang baik. Mereka menyuruh kami rajin bersekolah, rajin ke mesjid atau jangan minum-minum. Akan tetapi kadang kala mereka melakukan hal itu. Jadi gimana kami harus patuh terhadap mereka.

Krisis kepanutan, kepatuhan dan kepercayaan masyarakat itu tidak hanya terhadap tokoh dan pemuka masyarakat akan tetapi juga terhadap lembaga pemerintahan secara kelembagaan seperti kecamatan, pemerintahan nagari. Mereka tidak akan menerima begitu saja saran dan bimbingan dari pemerintah jika yang dilakukan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya. Akan tetapi jika sebuah ide dan saran yang diberikan tersebut sangat baik menurut masyarakat terutama bagi pemudanya maka tingkat solidaritas mereka sangat tinggi dalam mensukseskan acara tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bagaimana tingkat partisipasi dan solidaritas masyarakat dan pemuda dalam memeriahkan acara 17 Agustus 2003. Mereka bekerjasama dalam mengumpulkan dana untuk mengadakan acara panjat pinang, orgen tunggal dan carnaval.

H. Kesimpulan

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari berbagai peristiwa Bacakak Banyak ini adalah peristiwa ini sesungguhnya tidak mesti terjadi, jika beberapa pihak memahami lebih awal gejolak yang muncul. Satu hal yang pasti fenomena bacakak banyak yang terjadi di kabupaten Sawahlunto Sijunjung dapat dilihat dari berbagai perspektif. Artinya, untuk menerangkan persoalan ini tidak cukup dari satu perspektif saja, akan tetapi dapat dilihat dari banyak perspektif. Hal ini disebabkan akar-akar persoalan tidak berdiri sendiri, akan berkaitan erat dengan banyak persoalan lainnya, sehingga seperti lingkaran setan saja. Setidaknya, ada 6 pokok persoalan yang menjadi penyebab utama yaitu pendidikan, ekonomi, sosial, agama, elite lokal dan Kebijakan Pemerintah.

Persoalan pertama terletak pada daya intelektual masyarakat. Artinya, minat sekolah yang rendah dan kemauan belajar yang tidak membuat mereka memutuskan segala sesuatunya dengan emosi saja. Sekolah sendiri bukan tempat yang diminati remaja. Ungkapan yang muncul adalah kalau sekolah mencari uang, tanpa sekolahpun juga dapat uang. Lantas sekolah untuk apa menghabiskan umur dan uang di sekolah? Setidaknya begitu ungkapan keseharian yang ditemukan di kalangan anak-anak di peesaan kecamatan Pulau Punjung, terutama mereka yang tidak berminat untuk sekolah. Dunia pendidikan sendiri memang baru berkembang di wilayah itu. Tingkat pendidikan yang tertinggi adalah SMA, itupun baru dalam sepuluh tahun belakangan ini. Masalah minat belajar anak merupakan suatu persoalan sendiri. Rendahnya minat untuk belajar ini tidak terlepas dari mudahnya bagi mereka mendapatkan uang, sehingga tanpa harus sekolahpun, mereka sudah bisa kaya.

Kemampuan ekonomi ini bukannya membuat mereka berkembang secara ekonomi, akan tetapi justru mengakibatkan dampak sosial. Beberapa hal yang tidak dapat dihindari adalah minuman keras menjadi konsumsi keseharian bagi masyarakat, sehingga seringnyaterjadi keributan karena mereka mabuk-mabukan. Bahkan, yang lebih parah lagi adalah persoalan moral menjadi semakin terabaikan, karena mereka memiliki keuangan yang memadai, kemudian mereka mampu mengunjungi kehidupan malam seperti Bombay, sebuah komplek pelacuran yang terletak sekitar 20 km dari Pulau Punung atau perbatasan Riau Sumbar. Di Bombay ini, akan menjadi pemandangan biasa bagi orang-orang dari Pulau Punjung, Sungai Dareh, dan Sikabau untuk plesiran.

Agama juga menjadi hal yang terabaikan di kalangan. Artinya, agama yang diharapkan sebagai filter untuk menghambat atau menjadi benteng juga sudah ditembus. Keberagamaan pada ilirannya hanya sebagai serimonial yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat seperti solat Jum'at. Agama tidak mampu lagi membimbing atau masyarakat tidak lagi memiliki tingkat keyakinan dan menjalankan ideologi agama itu, sehingga tidak dapat menjaga mereka dari berbagai ujian yang ada.

Sementara itu, elite lokal yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat juga mengalami kegagalan. Bahkan, tidak jarang Tidaklah heran, dalam banyak kasus, tetua kampung secara tidak langsung juga ikut terlibat dalam perilaku tindakan kekerasan dan agresivitas di kalangan remaja. Misalnya saja, peristiwa akhir abad lalu anatara sungai Dareh dengan Pulau Punjung, ada skenario besar yang disiapkan untuk terjadinya perang antar kedua nagari itu. Dalam penyusunan skenario itu, keterlibatan elite lokal dari kedua nagari cukup tinggi, sehingga posisi mereka sebagai peredam konflik tidak ada. Justru sebliknya adalah merekalah yang menjadi pemicu konflik.

Pada akhirnya, jika sudah menelan korban dan mengganggu ketertiban umum, maka barulah pemerintah, polisi turun tangan untuk menyelesaikannya. Yang menjadi persoalan adalah ketika gejolak-gejolak yang berlangsung ditengah masyarakat masih dapat dikendalikan, dimanakah pemerintah saat itu. Artinya, ketika api masih kecil, ketika air masih riak ataupun konflik masih bisa dikendalikan, seharusnya berbagai pihak meredamnya. Namun, pihak pengusaha baru turun, ketika api sudah berkobar, banjir telah menghantam, dan perang terbuka telah pecah.

B. Sarasn-saran

1. Perang antar kampung ini sudah menjadi fenoimena sosial yang menyeluruh, sehingga diperlukan pemetaan potensi konflik untuk kemudian dibuatkan skenario pencegahannya.
2. Diperlukan sekelompok orang dari wilayah yang konflik untuk membuat agenda kegiatan bersama seperti lokakarya. Dalam hal ini, kedua pihak yang konflik itu merumuskan secara bersama agenda-agenda kegiatan bersama, yang sifatnya dapat menjalin hubungan kemanusiaan.
3. Bentuk-bentuk hubungan yang partisipatif antar wilyah yang berkonflik dibutuhkan, terutama untuk menjalin komunikatif antar mereka. Manakala muncul gejala-gejala konflik, maka mereka akan dapat dipertemukan dan dirundingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muluk Nasition, 1981. **Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927**. Jakarta : Mutiara.
- A.A. Navis, 1986. **Alam Berkembang Jadi Guru**. Jakarta : PT Grafiti press
- _____, (ed.),1988. **Dialektika Minangkabau**. Padang : PT Singgalang Press
- Adeng Sunardi, 1991. **100 tahun Tambang Baru Bara Ombilin**. Sawah Lunto : Tanpa Penerbit.
- Alfian (ed), 1986. **Kemiskinan Struktural**. Jakarta : YISS
- Arif. S, 1960. **UUPA dan Hukum Agraria dan HuKum Tanah dan Beberapa Masalah Hutan Agraria, Hukum Tanah**. Surabaya : Pustaka Tinta Mas
- Aswab Mahasin, 1989." Pola Gerakan Pinggiran," **Prisma**, No.7, th XVIII.
- Berkhofer, Jr., Robert F.,1971. **A Behaviopral Approach to Historical Analysis**. New York : The free Press.
- Bell, David, V.J., 1973. **Resistence and Revolution**. Boston : Hontoun Mifflin Company
- Brinton, Crene, 1984. **Anatomi Revolusi**. Jakarta : Bharatara.
- Bremen J.,1986. **Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja**. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Burke, Peter, 1992. **History and social Theory**. Cambridge, Polity Press.
- Chambers, R.,987. **Pembangunan Desa : Dimulai Dari Belakang**. Jaklarta : LP3ES.
- Debray, R., 1969. **Strategy for Revolution**. New York : Monthly Review Press.
- Djoko Suryo, 1985." Gerakan Petani," **Prisma** 11, th XIV.
- Dobbin, Christine, 1992. **Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah 1784-1847**. Jakarta : INIS.
- Dom Helder, Camara, 2001. **Spiral Kekerasan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwiza, 1999. **Miners, Managers and the State: A Socio-Political History of the Ombilin Coal-Mines, West Sumatra 1892-1996**. Phd. **Disertation**. University Amsterdam.
- Gilbert, Felix (eds), 1972. **Historical Studies Today**. New York W.W. Norton.

- Gotschalk, L., 1975. **Mengerti Sejarah**. UI, Jakarta.
- Hefner, Robert W., 1999. **Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik**. Yogyakarta : LKIS.
- Hoffer, Eric 1988. **Gerakan Massa**. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowidjojo, 1993. **Metodologi Sejarah**. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- _____, 1993. **Radikalisme Petani**. Bentang Press Intervisi Utama.
- Legg, Keith R, 1983. **Tuan, Hamba dan Politisi**. Jakarta : Sinar Harapan.
- L. Laeyendecker, 1986. **Tata, Perubahan dan ketimpangan suatu Pengantar Sejarah Sosiologi**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mestika Zed, dkk., 1988. **Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1995**, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong L., 1993. **Metode Penelitian Kualitatif**, Bandung : Remaja Rosda.
- Mubyarto, 1992. **Tanah dan Tenaga Kerja Kajian Sosial Ekonomi**. Yogyakarta : Adhya Media.
- Radcliffe, A.R. Brown, 1952. **Structure and Function in Primitif Society**. New York : The Free Press.
- Sartono Kartodirdjo, 1992. **Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah**. Jakarta : PT Gramedia.
- _____, 1984. **Pemberontakan Petani Banten 1888**, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Scott, James, 1985. **Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara**. Jakarta: LP3ES.
- _____, 2000. **Senjatanya Orang-orang Yang Kalah**. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Taufik Abdullah, 1987. **Islam dan Masyarakat**. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- _____, 1986. **Sejarah Lokal di Indonesia**, Yogyakarta : Gajah Mada University press.
- _____, 1982. "Disekitar Pencarian dan Pencarian Sejarah Lisan", dalam **Lembaran Sejarah Lisan Nomor 2 Oktober**.

Weber, Max, 1999. **Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme**. Jakarta : Pustaka Pramathea.

Wolf, E. R., 1983. **Petani Sebuah Tinjauan Antropologis**. Jakarta : CV Rajawali

Surat Kabar Singgalang

Surat kabar Haluan

Surat kabar Mimbar Minang

Surat kabar Semangat Demokrasi.